

# **inflasi dan ketegangan struktural**

6

**disusun oleh :**  
**dr. ali wardhana**

**penerbit : p. t. „ERESCO“ bandung**

Y95  
180

# INFLASI DAN KETEGANGAN STRUKTURIL

Disusun Oleh :  
Dr. ALI WARDHANA

Diterbitkan dengan bantuan  
Departemen Research Nasional

Djakarta.

P. T. ERESCO Dj. Geusanulun 1  
Bandung.

## KATA PENGANTAR

Didalam ketetapan M.P.R.S. No. VI/1965 tentang Banting Stir untuk Berdikari telah ditentukan dengan tegas bagaimana menghadapi masalah inflasi di Indonesia dewasa ini. Dengan djelas ditentukan, bahwa suatu stabilisasi harga melalui suatu politik harga jang berentjana harus diusahakan. Disamping itu masalah inflasi ini harus pula diatasi melalui pentjiptaan ongkos produksi jang stabil jang didasarkan atas rentjana produksi jang kongkrit sehingga hal ini akan merupakan dasar jang kuat serta memberikan iklim ekonomi jang sehat bagi perentjana pembangunan selanjutnya.

Bawasanja masalah inflasi ini telah mendjadi suatu ketetapan M.P.R.S. menundukkan betapa pentingnya usaha pembentukan inflasi ini jang hingga kini memang ternjata telah mengakibatkan suatu iklim jang tidak sehat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Didalam rangka inilah Dr. Ali Wardhana, anggota Staf Research LEKNAS, telah membahas persoalan inflasi di Indonesia ini. Berbagai matjam tjara pendekatan untuk menanggulangi masalah inflasi ini telah menimbulkan pula bermatjam-matjam analisa mengenai pemtjahannja.

Perbedaan pendapat mengenai menanggulangi masalah inflasi ini telah terjadi pula di-negara<sup>2</sup> Amerika Latin beberapa tahun jang achir<sup>2</sup> ini, seperti diketahui kebanjakan negara<sup>2</sup> didaerah tersebut telah pula mengalami inflasi untuk ber-puluh<sup>2</sup> tahun lamanja. Oleh karena-nja didalam kertas karya ini ingin dilihat apakah dari perbedaan mengenai masalah inflasi jang dihadapi oleh negara<sup>2</sup> di Amerika Latin tersebut bisa diperoleh pengertian jang lebih mendalam mengenai masalah inflasi pada umumnya, dan apakah pula ada relevansinya terhadap masalah inflasi jang sedang dihadapi di Indonesia.

Dr. Ali Wardhana sampai pada suatu kesimpulan bahwa didalam mengatasi persoalan inflasi ini harus diambil sebagai pegangan ketepuan didalam DEKON dimana dinjatakan bahwa „Keadaan jang mendesak ini tidak dapat diatasi sebagai masalah jang berdiri sendiri, ..... ketjuali atas dasar mengerakkan segenap potensi dan kekuatan rakjat sesuai dengan konsepsi integral untuk menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita”.

Harapan kami tidak lain semoga karya penelitian ini dapat membulkan pandangan serta pembahasan jang lebih mendalam mengenai persoalan jang begitu kompleks, sehingga benar<sup>2</sup> dapat terfjawai iklim ekonomi jang sehat sesuai dengan ketetapan MPRS tersebut diatas.

Djakarta, 1 Djuli 1965.

Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan  
Nasional - MIPI  
Direktur,

(Prof. Dr. Widjojo Nitisastro).

## INFLASI DAN KETEGANGAN<sup>2</sup> STRUKTURIL

Selama duapuluh tahun berdjalannja Revolusi Indonesia perobahan-perobahan dibidang ekonomi tampak dengan djelas. Perombakan daripada struktur ekonomi dan sistim ekonomi kolonial ke ekonomi sosialis Indonesia telah dapat dilaksanakan dalam waktu jang se-singkat<sup>2</sup>nja langsung dibawah pimpinan Pemerintah. Didalam usaha mendjebol jang buruk dan membangun jang baik ini dan pula „Disamping modal positif ini, sebagai akibat dari perdojoangan untuk menanam setjara teguh alat<sup>2</sup> Revolusi, kita sekarang menghadapi persoalan<sup>2</sup> sosial ekonomis jang agak mendesak seperti inflasi”.<sup>1)</sup>. Sudah djelas bahwa terhadap masalah inflasi inipun Pemerintah telah berulang kali menjatakan pendapatna untuk menanggulanginya. Hal ini telah dipertegas lagi didalam Ketetapan M.P.R.S. No. VI/1965 tentang Banting Stir untuk Berdikari dimana mengenai iklim ekonomi dinjatakan bahwa harus diusahakan „stabilisasi harga dengan melaksanakan politik harga jang berentjana ; memberantas inflasi dengan mentjiptakan ongkos produksi jang stabil berdasarkan plan produksi jang kongkrit di-unit<sup>2</sup> produksi, dan meletakkan dasar<sup>2</sup> jang kuat guna perentjanaan pembangunan berikutnja.” Bahwasanya masalah memberantas inflasi ini telah menjadi suatu ketetapan M.P.R.S. menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia telah mengakibatkan suatu iklim jang tidak sehat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Sementara itu didalam masjarakat sendiri telah timbul berbagai matjam pendapat mengenai usaha memberantas keadaan inflasi ini. Ada jang mengatakan bahwa hanja suatu moneter approach, jaitu suatu

<sup>1)</sup> Deklarasi Ekonomi, Departemen Penerangan R.I., hal. 11.

kebidjaksanaan jang dipusatkan pada bidang moneter sadja, jang dapat menanggulangi keadaan inflasi. Tetapi setelah terbukti bahwa setiap kali dilakukan tindakan<sup>2</sup> moneter inflasi masih tetap meradja-tela, timbul suatu pendapat lain jang menekankan pentingnya mengambil suatu tindakan jang didasarkan atas suatu production approach. Dalam hal ini mereka mengemukakan bahwa jang penting adalah usaha<sup>2</sup> untuk menaikkan produksi sehingga dengan demikian pertambahan supply barang<sup>2</sup> dapat mengimbangi atau paling tidak mendekati pertambahan djumlah uang jang beredar. Tingkat kenaikan inflasi dengan tjara ini diharapkan dapat dikekang.

Perbedaan pendapat mengenai masalah menanggulangi keadaan inflasi ini mengingatkan kita pada suatu perdebatan jang hangat jang terjadi pada beberapa tahun jang achir<sup>2</sup> ini di-beberapa negara jang sedang membangun, terutama di-negara<sup>2</sup> Amerika Latin, antara golongan „monetarist” disatu fihak dan golongan „structuralist” dilain fihak mengenai sebab<sup>2</sup> daripada inflasi, pengaruhnya terhadap pembangunan serta kebijaksanaan<sup>2</sup> jang harus ditempuh untuk menguasainya.<sup>2)</sup> Oleh karenanya uraian ini dimaksud untuk sekedar mendapatkan pengertian jang lebih mendalam mengenai masalah inflasi pada umumnya, serta melihat apakah dari inflasi jang sedang dihadapi oleh negara di Amerika Latin tersebut, ada relevansinya terhadap masalah inflasi jang sedang dialami di Indonesia ini.

<sup>2)</sup> Tulisan<sup>2</sup> jang terpenting mengenai pertentangan antara „monetarist” dan „structuralist” ini terdapat dalam tulisan<sup>2</sup> David Felix, „An Alternative View of the 'Monetarist' — 'Structuralist' Controversy”, dalam *Latin American Issues* (ed. Hirschman), New York, Twentieth Century Fund, 1961. Kemudian Roberto de Oliveira Campos, „The Views on Inflation in Latin America”, Hirschman, *op. cit.*; Joseph Grunwald, „Structuralist School on Price Stability and Development: The Chilean Case”, Hirschman, *op. cit.*; Raul Prebisch, „Economic Development or Monetary Stability: The False Dilemma”, *Economic Bulletin for Latin America* (March 1961); Dudley Seers, „A Theory of Inflation and Growth in Underdeveloped Economies based on the Experience of Latin America”, *Oxford Economic Papers*, June 1962. Bahan<sup>2</sup> jang dibahas dalam karangan ini diambil dari tulisan<sup>2</sup> tersebut diatas.

Latar belakang daripada perbedaan pendapat mengenai masalah inflasi ini ialah meradjalelanja keadaan inflasi di-negara<sup>2</sup> Amerika Latin semendjak kira<sup>2</sup> tahun 1930. Bagi beberapa negara malah sudah lebih lama lagi daripada itu. Chili misalnya, sudah hampir 100 tahun terus menerus hidup dalam keadaan inflasi. Diantara negara<sup>2</sup> jang telah mengalami inflasi ini, beberapa telah mendjalankan usaha<sup>2</sup> stabilisasi dengan sungguh<sup>2</sup> karena menganggap bahwa stabilisasi adalah suatu prasjarat guna pembangunan setjara besar<sup>2</sup>-an. Sebagian daripada negara<sup>2</sup> ini memang ternjata berhasil mentjapai keadaan ekonomi jang relatif stabil sehingga usaha<sup>2</sup> pembangunannjapun tampak menunjukkan hasil jang memuaskan. Tetapi ada sebagian pula, meskipun berhasil mengurangi keadaan inflasinya, djustru menundukkan gedjala<sup>2</sup> stagnasi dalam pertumbuhan ekonominya. Adanja perbedaan gedjala daripada usaha stabilisasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi telah melahirkan perbedaan pendapat dan tafsiran mengenai masalah inflasi ini.

Dengan singkat perbedaan pendapat ini pada pokoknya menjangkut persoalan apakah suatu kebijaksanaan stabilisasi adalah sedjalan dengan usaha<sup>2</sup> pembangunan ekonomi. Antara kedua golongan tersebut tidak terdapat perbedaan pendapat bahwa suatu kebijaksanaan moneter melalui suatu pengekangan moneter jang keras (monetary constraint) dapat menghasilkan suatu stabilisasi harga. Tetapi jang menjadi pertanyaan golongan structuralist ialah apakah stabilisasi jang ditjapai tadi tidak malah membahayakan pertumbuhan ekonomi, dalam arti kata terjadinya penggunaan jang tidak penuh daripada sumber<sup>2</sup> ekonomi dengan akibat bahwa pengorbanan sosialnya akan lebih besar daripada memberantas inflasi itu sendiri.

Pada azasnya golongan structuralist berpendapat bahwa kebijaksanaan moneter untuk tudjuhan stabilisasi tidak ada faedahnja ; mereka berpendapat bahwa stabilisasi harga akan tertjapai hanja lewat pembangunan ekonomi, artinjia hanja melalui kenaikan supply dan produksi. Jang menjadi sumber daripada inflasi ialah adanja ketegangan<sup>2</sup> strukturil jang terdapat dalam suatu ekonomi ; didalam hal ini peranan uang atau pengaruh daripada suatu ekspansi moneter hanjalah merupa-

kan faktor jang menjebabkan inflasi bertambah keras (propagating factor), tetapi pada dirinja bukan atau tidak menjadi sebab utama dari pada timbulnya inflasi. Stabilisasi jang ditjapai melalui kebijaksanaan moneter hanja menjearng gedjalana sadja dan tidak menjerang penjakinja. Meskipun demikian tidak pula disangkal bahwa pada achirnya inflasi tidak dapat berdjalanan terus dengan tidak adanya suatu ekspansi inflasi tidak dapat berdjalanan terus dengan tidak adanya suatu ekspansi moneter. Tetapi hal ini menurut mereka adalah tidak penting. Inflasi akan tetap ada meskipun kebijaksanaan moneter dapat mengurangi volume daripada permintaan moneter, sebelum ketegangan<sup>2</sup> struktural dapat dilenjapkan.

Perbedaan pendapat antara golongan monetarist dan golongan structuralist ini setjara kongkrit timbul didasarkan atas kenjataan mengenai keadaan<sup>1</sup> inflasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Argentina, Brasilia, Chili, Uruguay dan beberapa negara Amerika Latin lainnya.

Di Brasilia misalnya, meskipun antara tahun 1945 - 1960 inflasi telah meradjalela setjara terus menerus, tetapi ternjata bahwa hal ini tidak banjak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Memang ada beberapa sektor jang telah mengalami kemunduran<sup>2</sup>, tetapi sektor<sup>2</sup> lain ternjata mentjatat kemaduan<sup>2</sup> jang pesat sehingga kegiatan ekonomi sebagai keseluruhan mengalami pertumbuhan jang positip.<sup>3)</sup>

Di Chili, dimana inflasi telah merupakan suatu kebiasaan hidup dan sudah institutionalized didalam struktur perekonomian mereka, keadaannya adalah sebaliknya. Pada tahun 1955 misalnya, tingkat harga telah naik dengan lebih dari 80 persen dibandingkan dengan tahun<sup>2</sup> sebelumnya. Untuk mengurangi tekanan<sup>2</sup> inflasi jang berat tadi pada tahun 1956 telah diadakan suatu usaha stabilisasi jang berhasil dengan sangat memuaskan. Kebijaksanaan jang ditempuh pada waktu itu adalah mengadakan pembatasan<sup>2</sup> kredit bank, penjederhanaan pro-

<sup>3)</sup> Semendjak tahun 1963/1964 inflasi di Brazil telah mengakibatkan merosotnya kegiatan<sup>2</sup> ekonomi dalam negeri.

sedur import dan export, penjederhanaan kurs devisa, serta pembatasan terhadap kenaikan tingkat upah buruh jang melebihi produktivitasnya. Tingkat kenaikan harga dapat ditekan sampai pada suatu tingkat jang rendah, jaitu 15 persen pada tahun 1957. Tetapi tidak lama kemudian ternjata bahwa tindakan<sup>2</sup> stabilisasi jang berhasil baik tadi tidak membawa pengaruh jang baik pada tingkat pertumbuhan ekonomi Chili. Pengurangan djumlah permintaan melalui tindakan<sup>2</sup> moneter, ditambah pula dengan adanya suatu pengendalian upah telah menjebabkan berkurangnya perminatan terhadap barang<sup>2</sup> dan djasa<sup>2</sup> jang achirnya telah menimbulkan kerugian<sup>2</sup> pada golongan produsen. Kegiatan ekonomi daripada industri<sup>2</sup> banjak jang menurun sehingga menjebabkan bertambah besarnya pengangguran. Djuga dengan disederhanakannya sistem kurs devisa banjak perusahaan<sup>2</sup> jang tidak effisien terpaksa bekerdjia dibawah kapasitas, atau ditutup sama sekali. Dengan mundurnya kegiatan ekonomi serta menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah Chili pada tahun 1958 terpaksa mengadakan ekspansi moneter guna menghidupkan kembali perekonomiannya pada taraf semula dengan djalan memperbesar kredit<sup>2</sup> bank dan sumber<sup>2</sup> keuangan lainnya. Inflasi achirnya timbul lagi tetapi ternjata bahwa produksi, investasi serta pembentukan modal mengalami kemajuan pula.

Pada tahun 1960 suatu program stabilisasi ditjoba lagi. Inipun berhasil dengan baik dan tingkat perkembangan inflasi dapat dihentikan. Tetapi stabilisasi inipun ternjata membawa kemunduran<sup>2</sup> pada seluruh kegiatan masjarakat sehingga ekonomi berada dalam keadaan semi-stagnasi. Achirnya suatu ekspansi moneter terpaksa didjalankan lagi guna mengatasi keadaan.

Bagi golongan structuralist pengalaman di-negara<sup>2</sup> tersebut dianggap sebagai suatu kemenangan dan suatu kenjataan jang memberikan thesis mereka, jaitu : a) bahwa stabilisasi harga dapat ditjapai tetapi hanja dengan akibat merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan b) bahwa adanya inflasi tidak membahajakan pembangunan ekonomi. Mereka jakin bahwa suatu monetary approach terhadap persoalan-nya tidak akan membawa ekonomi ketaraf perkembangan ekonomi

jang lebih pesat. Kebidjaksanaan moneter jang orthodox seperti jang diandjurkan oleh golongan monetarist tidak mungkin akan dapat menghilangkan tekanan-tekanan inflasi sebelum ketegangan<sup>2</sup> struktural dapat dihapuskan.

Ketegangan<sup>2</sup> struktural jang dimaksudkan oleh golongan structuralist berhubungan erat dengan persoalan inelastisitas daripada penawaran. Inelastisitas daripada penawaran ini berlaku bagi sektor<sup>2</sup> agraria dan perdagangan internasional dan merupakan ketegangan struktural jang menjadi sumber daripada inflasi. Ketegangan struktural dibidang lain terdapat pada sektor anggaran belanja negara dan dalam pembagian pendapatan (distribution of income).

Menurut golongan structuralist gedjala urbanisasi jang selalu mengikuti suatu proses industrialisasi akan membawa akibat bahwa djumlah penduduk jang harus tergantung pada produksi agraria jang di perdagangkan (ialah bagian daripada produksi agraria jang tidak dikonsumsi oleh golongan petani sendiri) akan makin bertambah besar. Pertambahan permintaan jang disebabkan karena adanya pertambahan penduduk, dan mungkin ditambah pula dengan pertambahan permintaan jang disebabkan karena adanya perubahan pada komposisi permintaan orang<sup>2</sup> jang pindah kekota, hanja akan dapat diimbangi oleh suatu pertambahan penawaran apabila ada tukup elastisitas pada produksi bahan makanan. Apabila hal ini tidak terjadi, maka ini akan mengakibatkan kenaikan pada harga bahan<sup>2</sup> makanan. Dan memang menurut golongan structuralist ada beberapa faktor jang menjebabkan bahwa penawaran produksi dari sektor agraria ini tidak dapat dengan tuntas mengikuti suatu pertambahan permintaan. Pertama, jaitu adanya „absentee ownership” terhadap pemilikan tanah, atau gedjala<sup>2</sup> lain disektor agraria seperti pemilikan tanah untuk keperluan spekulasi atau penanaman modal, tuan<sup>2</sup> tanah jang tidak mengerjakan tanahnya dan buruh tani jang tidak mempunyai tanah. Hal<sup>2</sup> ini semua serta hubungan produksi jang masih bersifat feodal merupakan hambatan jang njata untuk menaikkan produksi dengan tuntas. Kedua, adanya pengawasan dan penekanan harga daripada bahan<sup>2</sup> makanan oleh

pemerintah karena dipandang sebagai bahan keperluan hidup jang pokok. Ini merupakan perangsang jang negatif terhadap produksi bahan makanan. Achirnya, surplus bahan makanan jang terjadi karena adanya perpindahan penduduk dari desa kekota biasanya oleh mereka jang ditinggalkan dipergunakan untuk menaikkan tingkat konsumsi mereka. Didalam negara dimana tingkat pendapatan adalah rendah, maka hasrat untuk menaikkan konsumsi tersebut adalah besar. Dengan demikian djumlah jang dapat disediakan dan diperdagangkan untuk memenuhi konsumsi penduduk kota tidak mengalami suatu pertambahan jang berarti.

Gedjala<sup>2</sup> ini semua menjebabkan bahwa selalu akan terdapat tekanan terhadap harga<sup>2</sup> bahan makanan untuk naik. Apabila terlaksana, maka ini akan mengakibatkan kenaikan upah buruh dan pegawai sehingga achirnya akan menarik keatas biaja produksi pada umumnya. Djika golongan produsen selanjutnya berhasil melempar kenaikan biaja ini pada golongan konsumen — kemungkinan ini besar apabila produsen memegang posisi monopoli atau oligopoli —, maka kenaikan harga akan menjebar kesemua sektor ekonomi.

Keterangan struktural jang terdapat pada sektor perdagangan internasional terutama terletak pada persoalan kapasitas mengimpor suatu negara. Kebanjakan negara<sup>2</sup> jang sedang membangun kapasitas impornya adalah rendah dan biasanya juga tidak stabil. Hal ini disebabkan karena kebanjakan negara<sup>2</sup> tersebut eksportnya tergantung dari satu atau dua matjam bahan mentah sadja dan jang sering pula terpengaruh oleh fluktuasi<sup>2</sup> harga dipasar internasional. Ini menimbulkan ketidak-stabilan dalam penghasilan devisa dan dengan demikian dalam kapasitas untuk impornya.

Didalam masalah kapasitas impor itu sendiri berlaku „Prebisch thesis”, jaitu adanya perbedaan antara elastisitas pendapatan daripada impor untuk negara<sup>2</sup> jang sedang membangun dan negara<sup>2</sup> jang sudah berindustri. Untuk negara<sup>2</sup> industri kenjataan membuktikan bahwa

mereka ini mempunjai elastisitas pendapatan untuk impor jang relatif rendah, biasanja kurang dari satu. Impornya berasal sebagian besar dari negara<sup>2</sup> jang sedang membangun dalam hal bahan mentah dan hasil pertambangan. Elastisitas pendapatan jang rendah untuk impor ini berarti bahwa suatu kenaikan pada pendapatan nasional tidak membawa kenaikan jang sebanding pada permintaan akan bahan<sup>2</sup> mentah.

Sebaliknya, negara<sup>2</sup> jang sedang membangun jang impornya datang dari negara<sup>2</sup> industri mempunjai elastisitas pendapatan untuk impornya jang lebih besar dari satu, terutama untuk impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal. Hal ini disebabkan karena industri barang modal dalam negeri belum tersedia. Perbedaan elastisitas pendapatan daripada impor ini menjebabkan adanya ketidak-seimbangan jang chronis pada posisi neratja perdagangan luar negeri daripada negara<sup>2</sup> jang sedang membangun tadi. Dengan demikian, apabila impor selalu melebihi ekspor gedjala kekurangan devisa jang chronis akan terjadi. Untuk mengatasi keadaan ini biasanja beberapa alternatif ditempuh. Pertama, mengadakan pengawasan terhadap lalu lintas barang melalui pengawasan devisa ; kedua, mengadakan devaluasi apabila dipandang perlu. Tetapi seperti kita ketahui pada dirinya kedua matjam tindakan ini bersifat inflator, sehingga djustru akan menambah tekanan inflasi jang ada.

Selain daripada itu, golongan structuralist juga mengemukakan bahwa suatu ketidak seimbangan jang chronis pada neratja perdagangan internasional akan menimbulkan hasrat untuk mendirikan industri-industri didalam negeri jang bersifat pengganti impor, terutama industri barang-barang jang impornya dibatasi. Tetapi menurut mereka hal ini tidak akan menghilangkan ketidak-seimbangan tadi, malahan mungkin akan menimbulkan ketegangan<sup>2</sup> lain. Ada kemungkinan bahwa industri<sup>2</sup> pengganti import tadi masih tetap memerlukan barang<sup>2</sup> impor setjara terus-menerus, misalnya untuk bahan<sup>2</sup> bakunja, spare partsnya, pembungkusnya (seperti plastic bags untuk pabrik pupuk Sriwidjaja), dsb. Paling tidak barang<sup>2</sup> modalnya masih harus diimpor.

Tidak boleh pula dilupakan bahwa dengan bertambahnya industri dan pabrik<sup>2</sup> jang didirikan maka akan bertambah pula kebutuhan<sup>2</sup> akan tenaga, alat<sup>2</sup> transport, komunikasi, dan lain<sup>2</sup> jang semuanja merupakan barang-barang modal jang harus diimpor.

Kemudian ada kemungkinan pula bahwa suatu industri pengganti jang baru didirikan harus diberi perlindungan terhadap persaingan-persaingan. Bagi suatu industri jang tidak effisien maka hal ini berarti memberi perlindungan kepada suatu industri jang mempunjai produktivitas jang rendah, dengan perkataan lain menghasilkan suatu produk jang tinggi harganya. Suatu gedjala inflasi jang tidak disebabkan karena ekspansi moneter. Djika produktivitas daripada industri tadi tidak dapat dengan tjeput dinaikkan maka ada kemungkinan bahwa perlindungan jang terus-menerus harus dilaksanakan.

Golongan structuralist menginterpretasikan gedjala<sup>2</sup> diatas sebagai suatu ketegangan struktural jang menjokong tingkat harga jang tinggi.

Gedjala struktural lain jang merupakan penghambat untuk menambah fleksibilitas ekonomi suatu negara jang sedang membangun, adalah adanya perbedaan pembagian pendapatan jang menjolok. Perbedaan ini pada dirinya memberikan suatu pola dan komposisi daripada permintaan jang tidak menguntungkan bagi kegiatan<sup>2</sup> pembangunan. Terutama golongan jang berpendapat tinggi mempunjai pengaruh jang sangat besar didalam menentukan ttorak dan arah produksi dalam negeri maupun barang<sup>2</sup> jang diimpork. Suatu pola permintaan jang terutama ditunjukkan pada barang<sup>2</sup> konsumsi jang bersifat mewah selain tidak menguntungkan investasi jang produktif djuga tidak menguntungkan produksi sektor pertanian seperti dikatakan diatas. Didalam hal ini tingkat tabungan masjarakat jang rendah jang disebabkan karena memang tingkat pendapatan adalah rendah, akan makin berkurang lagi karena adanya pola konsumsi jang berkelebih-lebihan dari golongan pendapatan jang tinggi ini.

Selandjutnya anggaran belanja negara adalah ketegangan struktural lain jang dikemukakan oleh golongan structuralist. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna membajai roda administrasi pemerintahan serta keperluan<sup>2</sup> routine lainnya adalah kaku dalam arti kata tidak mudah dikurangi besarnya dengan tidak menimbulkan effek<sup>2</sup> sosial jang tidak diinginkan. Dalam kedaan demikian jika penerimaan negara mengalami suatu kemunduran, salah satu pengeluaran jang biasanya dikorbankan adalah pengeluaran guna pembajajaan pembentukan modal. Hal ini merupakan suatu kedadian jang dipandang dari sudut pembangunan ekonomi sangat tidak menguntungkan karena berakibat memperketjil elastisitas daripada supply. Apabila sebagai alternatif didjalankan deficit spending, maka pengaruh inflasi akan terasa lebih tjeput.

Djuga struktur perpadjakan pada umumnya menunjukkan bahwa sebagian besar daripada pendapatan negara tergantung dari padjak<sup>2</sup> tidak langsung. Padjak<sup>2</sup> demikian tadi sifatnya adalah regressif, pada dirinya mempunyai pengaruh langsung untuk menaikkan harga dan tidak effektif untuk dipergunakan sebagai tindakan anti-inflasi.

Ketegangan<sup>2</sup> struktural jang dibentangkan oleh golongan structuralist tadi merupakan faktor pokok daripada sumber<sup>2</sup> inflasi. Didalam keadaan jang demikian berbagai<sup>2</sup> golongan masjarakat akan berusaha mempertahankan pendapatan riilnya dan didalam proses ini mereka akan memperkeras gedjala<sup>2</sup> inflasi. Usaha mempertahankan tingkat pendapatan riil ini tertjermin didalam usaha mereka untuk mendapatkan kenaikan-kenaikan upah dan gadji, perusahaan<sup>2</sup> akan berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan kredit<sup>2</sup> bank, dan fihak negarapun akan mempertahankan pengeluaran riilnya dengan djalan deficit spending. Menurut golongan structuralist inflasi jang ditimbulkan karena adanya kegiatan<sup>2</sup> untuk melindungi pendapatan riil ini adalah hanja „propagating factors” (faktor jang memperkeras inflasi) sadja, dan berlainan dengan inflasi jang disebabkan karena ketegangan<sup>2</sup> struktural. Oleh karena itu suatu kebidjaksanaan moneter seperti jang di-

andjurkan oleh golongan monetarist untuk mengadakan stabilisasi hanja akan tertudju pada propagating factors ini sadja dan bukan pada ketidak-seimbangan struktural jang ada dalam masjarakat.

Kebidjaksanaan jang diandjurkan oleh golongan structuralist dengan demikian tidak terletak pada bidang moneter tetapi pada bidang riil, jaitu menghilangkan ketegangan<sup>2</sup> struktural tadi. Ini berarti mengusahakan elastisitas dan flexibilitas daripada produksi jang lebih besar, terutama di-sektor<sup>2</sup> agraria dan perdagangan luar negeri dan berusaha pula memperketjil atau menghilangkan perbedaan jang terdapat pada penjebaran pendapatan. Menurut golongan ini tudjuan kebidjaksanaan pemerintah adalah pembangunan ekonomi dan bukan stabilisasi moneter.

Jika kita ingin meneliti lebih mendalam lagi mengenai asal mula pemikiran<sup>2</sup> mengenai structuralism ini, maka nama Leontieff harus pertama<sup>2</sup> disebut. Analisanja mengenai hubungan antar-industri serta penggunaan daripada analisa input-output sangat mempengaruhi development programming di-negara<sup>2</sup> Amerika Latin. Beberapa elemen dari pada teori<sup>2</sup> structuralist dapat kita ketemukan dalam teori<sup>2</sup> ahli ekonomi seperti Raul Prebisch, dsb. Dengan demikian maka teori<sup>2</sup> structuralist jang dikembangkan oleh golongan ini mempunyai landasan<sup>2</sup> teori jang kuat sehingga menurut beberapa penulis teori structuralist ini merupakan suatu teori baru jang dalam dasawarsa enampuluhan ini sangat mungkin akan menduduki tempat jang utama.

Berlawanan dengan pendapat golongan structuralist ini, golongan „monetarist” menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak diusahakan terlebih dahulu stabilisasi ekonomi. Inflasi merupakan penghalang jang besar dan merupakan economic cost jang tinggi dalam suatu usaha pembangunan karena merusak struktur harga dan pasaran, memberikan stimulasi kepada spekulasi dan dengan demikian membelokkan kegiatan<sup>2</sup> investasi kearah jang tidak produktif. Investasi jang dilaksanakan biasanya ditudjukan pada sektor<sup>2</sup> atau kegiatan jang dapat mendjamin terhadap kemerosotan

nilai-uang seperti pembelian tanah, barang mewah, devisa gelap, penimbunan barang, dsb. Tabungan masjarakat jang diperlukan guna membajai pembangunan dalam keadaan inflasi akan sangat berkurang atau djumlahnya tidak berarti. Inflasi djuga merusak nilai<sup>2</sup> moril dan sosial terhadap kedjudjurran bertindak dan bekerja sehingga merusak salah satu sendi pokok jang diperlukan bagi pertumbuhan suatu ekonomi jang sehat. Dilapangan perdagangan internasional inflasi akan membawa kesulitan<sup>2</sup> pada neratja pembajaran akibat merosotnya export, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dan lalu lintas devisa terpaksa didjalankan ataupun penggunaan daripada suatu sistim multiple exchange rate.

Oleh karena itu suatu kebidjaksanaan stabilisasi melalui anggaran belanja jang seimbang, pembatasan<sup>2</sup> pada ekspansi kredit bank pelaksanaan kebidjaksanaan moneter jang konvensionil, pengawasan terhadap permintaan kenaikan<sup>2</sup> gadji dan upah jang melampaui produktivitas, serta penggunaan suatu exchange rate jang sederhana atau uniform akan mentjiptakan suatu keadaan jang sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi.

Berdasarkan penjelidikan dan observasi jang empiris golongan monetarist ini membuktikan bahwa dikebanjakan negara jang dapat mendjamin stabilisasi ekonominja, misalnya Meksiko, Venezuela, Ecuador, El Salvador, dsb., tingkat pembentukan modal dan tingkat pertumbuhan ekonominja djauh lebih besar daripada negara<sup>2</sup> jang mengalami keadaan inflasi seperti Argentina, Bolivia, Colombia, Brazil, dsb.

Eksponen jang terbesar dan jang benar<sup>2</sup> menghendaki didjalankannya kebidjaksanaan stabilisasi seperti jang diandjurkan oleh golongan monetarist ini ialah IMF. Hal ini ternjata daripada adanja ketentuan-ketentuan dan sjarat<sup>2</sup> (kadang<sup>2</sup> mutlak) dari fihak IMF jang menghendaki adanja stabilisasi ekonomi sebelum pindjaman<sup>2</sup> dapat diberikan kepada suatu negara. Kebidjaksanaan jang demikian tadi pada umumnya diikuti oleh negara<sup>2</sup> lain didalam menentukan kebidjaksanaan bantuan luar negerinja.

Setjara singkat dapat disimpulkan pendapat golongan monetarist, jaitu bahwa :

1. inflasi tidak sadja memberikan suatu suasana jang tidak sehat terhadap pembangunan ekonomi, tetapi djustru merupakan penghambat jang njata.
2. suatu kebidjaksanaan moneter dan fiskal jang dapat mengekang excess demand harus dilaksanakan untuk menjapai stabilisasi sebagai landasan pembangunan jang sehat selanjutnya.
3. kebidjaksanaan moneter dan fiskal jang tepat djustru dapat meniadakan atau mengurangi ketegangan struktural jang ada didalam masjarakat.

Sebaliknya golongan structuralist berpendapat bahwa :

1. inflasi adalah inherent dengan pembangunan.
2. inflasi bukan disebabkan karena ekspansi moneter tetapi disebabkan karena adanja ketegangan<sup>2</sup> struktural didalam masjarakat.
3. suatu program stabilisasi moneter tidak akan menghilangkan inflasi, tetapi djustru akan mengakibatkan stagnasi dalam pembangunan.

Kedua aliran pendapat jang disebutkan diatas tadi sebenarnya belum terdapat di Indonesia karena persoalan inflasi memang belum pernah dibahas didalam rangka tersebut. Pendapat<sup>2</sup> mengenai inflasi, stabilisasi dan pembangunan ekonomi masih sering dikemukakan setjara individuul.

Dalam hal ini Prof. Kurt Martin, jang dalam tahun 1963 selama tiga bulan menjadi economic consultant pada Departemen Urusan Research Nasional, pernah membahas persoalan inflasi di Indonesia ini dengan menggunakan structuralist approach ini.<sup>4)</sup> Didalam penerbit-

<sup>4)</sup> Kurt Martin, „Laporan Seminar Inflasi dan Pembangunan Ekonomi“ Warta Leknas, Th. I/No. 4/1963.

annja „Laporan Seminar Inflasi dan Pembangunan Ekonomi”, *Warta Leknas* Th. I/No. 4/1963, dikemukakan beberapa model untuk membahas sebab<sup>2</sup> daripada inflasi.

Dalam Model I penulis tersebut mengatakan bahwa di-negara<sup>2</sup> jang sedang membangun, inflasi dapat terjadi bila terdapat kekurangan persediaan bahan makanan dalam masjarakat. Kekurangan ini bisa terjadi bila investasi dan employment bertambah tetapi tidak diikuti dengan pertambahan hasil bahan makanan, karena elastisitas daripada sektor pertanian adalah ketjil sekali. Djika kegiatan investasi bertambah maka kenaikan harga daripada barang<sup>2</sup> konsumsi akan terjadi sebagai akibat daripada adanya excess demand. Dalam hal ini Martin juga mengadakan assumsi bahwa dengan ditariknya sebagian daripada penduduk untuk keperluan investasi djumlah output jang dapat dihasilkan oleh golongan jang ditinggalkan tidak akan berkurang. Dengan demikian, meskipun terjadi suatu kenaikan investasi, aggregate consumption tidak akan berubah dan tetap seperti semula. Tetapi djumlah output atau surplus bahan makanan jang tersedia achirnya akan terbagi sedemikian rupa sehingga mereka jang dipekerjakan pada projek<sup>2</sup> investasi baru tadi akan mendapat bagiannya. Mereka ini akan berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan sebanyak mungkin — melalui kenaikan<sup>2</sup> upah, dsb. — bagian dari surplus ini, dan didalam usaha melaksanakan hal ini harga daripada barang<sup>2</sup> konsumsi akan naik. Menurut pendapatnya, andaikatapun mereka jang dipindahkan ini berhasil mendapatkan seluruh surplus, kemungkinan kekurangan bahan makanan tetap ada karena mereka jang dipindahkan ini biasanya mempunyai hasrat konsumsi jang lebih besar daripada semula.

Pembahasan masalah inflasi melalui Model I ini adalah serupa dengan analisa jang diberikan oleh golongan structuralist mengenai inflasi jang berasal dari keterangan struktural sebagai akibat dari adanya inelastisitas supply pada sektor pertanian.

Didalam Model II Kurt Martim kemudian memberikan penelaahan jang sesuai pula dengan apa jang dikemukakan oleh golongan structuralist mengenai masalah ketegangan impor. Dalam model ini ia

menjatakan bahwa inflasi dapat terjadi apabila terdapat suatu kekurangan dalam impor (import shortage). Apabila didalam negara<sup>2</sup> jang sedang dalam taraf pembangunan terjadi suatu kenaikan income akibat adanya pertambahan kegiatan<sup>2</sup> investasi, maka tingkat pertambahan impor akan lebih besar daripada tingkat pertambahan pendapatan. Hal ini disebabkan karena investasi tadi mengandung suatu import content jang lebih besar daripada konsumsi. Dengan demikian maka suatu pertambahan dalam kegiatan<sup>2</sup> investasi dan produksi akan menjebabkan bertambah besarnya tekanan pada djumlah devisa jang tersedia (ketjuali kalau expor dapat bertambah lebih tjeplat daripada tingkat pendapatan). Keadaan ini pada dirinya akan menimbulkan adanya suatu kekurangan impor. Suatu kenaikan harga jang disebabkan karena adanya ketegangan pada sektor impor ini dapat meluas ke-sektor<sup>2</sup> lain dan achirnya akan saling pengaruh-mempengaruhi.

Dalam kesimpulannya Kurt Martin mengakui bahwa dalam tiap inflasi ada kelebihan permintaan (excess demand), tetapi menurut pendapatnya jang penting adalah bahwa harus dapat dibedakan inflasi jang disebabkan karena adanya ketegangan<sup>2</sup> struktural dan inflasi jang disebabkan karena adanya excess demand. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa stabilisasi harga dapat ditcapai, tetapi mungkin hanja dengan mengorbankan pembangunan, dan ini bukan jang menjadi tudjuan !<sup>5)</sup>

Demikian tadi sedikit mengenai masalah inflasi dibidang analisa. Dibidang policy, tindakan<sup>2</sup> jang diambil oleh Pemerintah untuk menanggulangi keadaan inflasi di Indonesia hingga saat ini untuk sebagian besar ditekankan pada tindakan<sup>2</sup> dibidang ekonomi moneter. Pada tahun 1951 misalnya, Indonesia mulai mengenal salah satu tindakan moneter jang sangat drastis, jaitu penggantungan uang. Tindakan ini mungkin merupakan salah satu tindakan jang paling tidak populer dimata rakjat. Semendjak itu Indonesia mengenal tindakan<sup>2</sup> moneter lainnya seperti devaluasi, baik jang terbuka maupun jang tak kentara.

<sup>5)</sup> Kurt Martin, *op. cit.*, hal. 6.

sanering uang, pembatasan<sup>2</sup> pada ekspansi kredit bank, pengeluaran uang nilai baru, dsb. Dibidang Anggaran Negara djuga telah dilakukan usaha<sup>2</sup> untuk memperketjil defisit jang terjadi tiap tahunnya dengan mentjoba mengadakan penghematan pada pengeluaran<sup>2</sup>, mentjari sumber<sup>2</sup> baru bagi penerimaan, perbaikan tjara-tjara pemungutan padjak, pengeluaran obligasi<sup>2</sup>, dsb. Alasan mengapa program<sup>2</sup> stabilisasi tersebut dipusatkan terutama dibidang moneter ialah karena adanya pandangan bahwa sumber utama daripada inflasi timbul dari ekspansi moneter sebagai akibat daripada defisit Anggaran Belanda dan perluasan kredit<sup>2</sup> bank. Djadi apabila djumlah uang jang beredar dapat dibatasi, maka diharapkan bahwa permintaan moneter dapat dikekang<sup>2</sup> dan gedjala inflasi dengan demikian dapat dikendalikan. Tindakan<sup>2</sup> jang terutama ditudjukan dibidang moneter ini kemudian terkenal dengan nama „moneter approach”.

Setelah ternjata bahwa moneter approach ini tidak membawa hasil seperti jang diharapkan, dan pula setelah didalam DEKON dengan tegas dinjatakan bahwa „untuk menanggulangi kesulitan<sup>2</sup> ekonomi sekarang tidak akan diambil tindakan<sup>2</sup> moneter jang drastis, seperti umpanan devaluasi, pengguntingan uang, pengeluaran uang nilai baru, dsb.”, maka timbulah fikiran untuk mentjoba menanggulangi masalah inflasi ini dengan tjara lain. Tjara ini kemudian disebut „production approach” jang, berlainan dengan moneter approach, menghendaki adanya tindakan<sup>2</sup> dibidang jang riil, artinya dibidang supply dan produksi. Untuk ini Pemerintah dan masjarakat harus berani menempuh djalan<sup>2</sup> jang progresif dan non-konvensionil. Jang penting ialah bagaimana supply didalam masjarakat dapat dinaikkan dengan tjeput sehingga arus barang dan djasa jang tersedia dalam masjarakat dapat mengimbangi arus uang jang beredar. Apabila hal ini dapat ditjalai maka inflasi dengan sendirinya akan dapat teratas. Suatu moneter approach sadja didalam menghadapi masalah kesulitan<sup>2</sup> ekonomi tidak akan membawa hasil apa<sup>2</sup>.

Meskipun antara „moneter approach” dan pendapat golongan „monetarist” disatu sifak dan „production approach” dan golongan

„structuralist” dilain sifak terdapat banjak persamaan<sup>2</sup>, tidaklah berarti bahwa jang satu adalah identik dan dapat disamakan dengan jang lain. Baik dilihat dari sudut latar belakang pertumbuhan maupun dilihat dari sudut penilaian mengenai masalah inflasi terdapat perbedaan-perbedaan. Moneter approach maupun production approach jang terdapat di Indonesia ke-dua<sup>2</sup>nya menekankan perlunya stabilisasi moneter sebagai sjarat mutlak untuk dapat mengadakan pembangunan ekonomi jang sehat. Kedua approach mempunyai pendapat dan penilaian jang sama mengenai inflasi, jaitu bahwa inflasi membawa pengaruh-pengaruh jang tidak diinginkan terhadap keadaan ekonomi dan sosial masjarakat. Sudah sedjak lama inflasi dipandang sebagai sesuatu jang menjebabkan merosotnya keadaan ekonomi keuangan negara. Hal ini dengan djelas dilukiskan didalam pidato P.J.M. Presiden Sukarno jang berjudul „Ambeg Parama Arta” didepan MPRS, jaitu bahwa : „Sesungguhnya keadaan ekonomi-moneter Negara kita sudah kurang sehat dan sudah mulai meluntur ke-sesuraman sedjak dari mulai tahun 1951. Dalam berbagai keterangan Pemerintah jang dahulu<sup>2</sup> dan dalam ber-matjam<sup>2</sup> tindjauan ekonomi-keuangan Negara kita, telah tergambar dengan djelas merosotnya dan mundurnya keadaan ekonomi keuangan kita”.

Kalau kita tindjau lebih mendalam maka memang terlihat bahwa semendjak tahun 1951 sifat inflasi telah berubah. Ladju perkembangannya menunjukkan ketjepatan jang makin lama makin menanjak, sehingga apabila tidak diambil tindakan<sup>2</sup> dengan segera akan ada bahaya bahwa inflasi tak akan terkendalikan lagi. Kesulitan<sup>2</sup> jang ditimbulkan oleh inflasi, terutama dibidang pembangunan, dirasakan pula oleh Pemerintah pada waktu diadakan penjusunan rantjangan Dasar Undang<sup>2</sup> Pembangunan Nasional-Semesta-Berentjana Delapan Tahun, dimana dinjatakan bahwa „..... situasi moneter dan ekonomi Indonesia dapat dikatakan dalam keadaan bahaja tekanan inflatioir terbuka, jang apabila tidak segera diambil kebijaksanaan politik moneter dan fiskal jang djitu akan melumpuhkan perekonomian sama sekali. Produksi akan terus menerus merosot, jang berarti arus barang akan terus-

menerus berkurang, uang akan selalu bertambah dalam peredaran. harga<sup>2</sup> akan membubung, tuntutan kenaikan upah akan terjadi, dan investasi<sup>2</sup> akan berkurang lagi .....<sup>6)</sup>.

Dengan demikian djelaslah bahwa tidak hanja golongan monetar approach dan production approach sadja, tetapi djuga masjarakat dan Pemerintah tidak menghendaki adanja inflasi di Indonesia.

Didalam membahas masalah inflasi di Indonesia, terutama mengenai pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan serta pembangunan ekonomi, sebenarnya suatu kwalifikasi harus diberikan didalam penelahanannya. Ada jang berpendapat bahwa masalah ini harus ditindjau dalam hubunganya jang lebih luas dengan memperhatikan faktor<sup>2</sup> jang non-ekonomi pula. Hal ini disebabkan karena timbulnya inflasi di Indonesia sebagian besar disebabkan karena adanja defisit Anggaran Belanja Pemerintah jang ditudjukan untuk keperluan keamanan dan pertahanan. Semendjak timbulnya pemberontakan<sup>2</sup> PRRI-Permesta, dsb. kurang lebih 50 persen sendiri dari seluruh penerimaan Pemerintah dipergunakan untuk keperluan ini ; kalau dibandingkan dengan seluruh djumlah pengeluaran hal ini berkisar antara 30 sampai 50 persen atau lebih.

Meskipun demikian, pengalaman<sup>2</sup> inflasi di Indonesia, terutama pada waktu ini, tetap dapat memberikan pelajaran jang sangat berguna bagi pengertian jang lebih mendalam karena pada umumnya gedjala<sup>2</sup> daripada setiap inflasi adalah sama meskipun sebab<sup>2</sup>nja dapat berbeda.

Didalam membahas golongan structuralis perlu didjelaskan disini bahwa golongan ini di Amerika Latin lebih terkenal sebagai pengekritik daripada sebagai perentjana.<sup>7)</sup> Artinjia, mereka tidak pernah setjara kongkrit mengemukakan, baik setjara lisan maupun tulisan<sup>2</sup>.

<sup>6)</sup> Rantjangan Dasar Undang<sup>2</sup> Pembangunan Nasional-Semesta-Berentjana Delapan Tahun : 1961 - 1969, hal. 3710.

<sup>7)</sup> D. Felix, „An Alternative View of the „Monetarist” - „Structuralist” Controversy”, Hirschman, op. cit., hal. 83.

suatu kebijaksanaan bagaimana ketegangan<sup>2</sup> struktural jang mereka kemukakan tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan. Mereka hanja menundukkan adanja gedjala<sup>2</sup> struktural sadja.

Kelemahan lain daripada golongan structuralist ini ialah bahwa analisa jang mereka adjukan didasarkan atas keadaan di Chili sadja dan dari keadaan jang spesifik ini hendak menarik kesimpulan jang berlaku setjara umum. Di Brazil sendiri, dimana tadinya inflasi memang tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya, akhir<sup>2</sup> ini terpaksa mengakui bahwa inflasi jang makin menandjuk ini achir-aja telah menimbulkan kematjetan<sup>2</sup> dibidang investasi dan produksi. Dengan perkataan lain, mungkin pada mulanya inflasi jang masih dapat dikendalikan tidak banjak mengganggu djalannya pertumbuhan ekonomi, tetapi keadaan jang sebaliknya akan timbul apabila inflasi ini di biarkan meradajela terus-menerus.

Untuk mengudji pendapat golongan structuralist setjara makro-ekonomi, seharusnya ditjari korelasi antara djumlah uang jang beredar, tingkat kenaikan harga dan tingkat pertambahan produksi nasional. Pada umumnya tidak mudah melihat adanja suatu hubungan jang positip antara kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Seperti dinjatakan oleh golongan monetarist diatas, negara<sup>2</sup> jang mengalami inflasi seperti Argentina, Bolivia, Brazil, dsb., perkembangan ekonominya ternjata mandek, sedang negara<sup>2</sup> jang berhasil menurunkan ladju inflasinya seperti Mexico, Venezuela, dsb. menundukkan pembangunan jang memuaskan.<sup>8)</sup>

Bagi Indonesia, meskipun data mengenai tingkat pertumbuhan GNP tidak lengkap, tetapi dari apa jang tersedia dan dari indikasi<sup>2</sup> lainnya, setjara kasar dapat kita tjoba menarik beberapa kesimpulan.

Untuk mudahnya kita dapat membagi inflasi di Indonesia dalam tiga perioda, jaitu Perioda I adalah antara 1950 - 1957, Perioda II

<sup>8)</sup> Roberto de Oliveira Campos, „Two Views on Inflation in Latin America”. Hirschman, op. cit., hal. 70.

antara 1957 - 1961, dan Perioda III antara 1961 - 1964. Didalam tiap<sup>2</sup> perioda ladju perkembangan inflasi adalah berbeda. Djadi dalam perioda I misalnya, tingkat kenaikan inflasi adalah antara 10 - 30 persen tiap tahunnya, sedang pertambahan djumlah uang jang beredar rata<sup>2</sup> tiap tahunnya naik dengan 30 persen. Tingkat kenaikan inflasi jang tertinggi terjadi dalam tahun 1955, jaitu sebesar 40 persen. Didalam perioda II volume uang maupun tingkat harga melondjak dengan tjeput, jaitu rata<sup>2</sup> antara 30 sampai 50 persen tiap tahunnya. Ini berarti bahwa dalam perioda ini kenaikan tahunan tingkat harga kira-kira adalah 2 kali kenaikan perioda II. Tahun 1958 mentjatat kenaikan jang paling tinggi selama perioda II ini, jaitu 55 persen. Dalam perioda III pertambahan djumlah uang jang beredar rata<sup>2</sup> mentjapai 100 persen tiap tahunnya, tetapi kenaikan tingkat harga sudah djauh melampaui prosentasi ini, jaitu rata<sup>2</sup> 120 sampai 200 persen tiap tahunnya. Tahun 1962 merupakan rekor karena dalam tahun itu tingkat harga telah mentjatat suatu kenaikan jang sangat besar, jaitu lebih dari 300 persen.

Dengan perkataan lain, keadaan ekonomi moneter selama ketiga perioda ini menunjukkan bahwa baik djumlah uang jang beredar maupun tingkat inflasi telah naik dengan ketjepatan jang makin lama makin progressif.

Tabel I

**Tingkat Pertumbuhan GNP : 1952 - 1968**

Tahun	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961 - 1968
G.N.P.	6,6%	6,5%	7,2%	6,8%	7,1%	7,7%	4,9%	2,3%	2,3%	2,2%

Angka<sup>2</sup> disadur dan dihitung kembali dari data jang terdapat pada Biro Perantjang Negara, Biro Finek, Depernas, Bappenas, dan Biro Pusat Statistik.

Dari Tabel I dapat kita lihat bahwa dalam perioda I, suatu perioda jang dapat kita anggap relatif stabil, tingkat pertambahan GNP memperlihatkan gedjala jang menaik. Tahun 1955 agak turun sedikit

dan seperti diterangkan diatas tahun 1955 merupakan tahun dimana kenaikan harga menunjukkan tingkat kenaikan jang paling tinggi (40 persen) untuk perioda I.

Dalam perioda II, tingkat pertumbuhan GNP tidak hanja menurun dibandingkan dengan tahun<sup>2</sup> sebelumnya, tetapi malah semendjak tahun 1958 (tingkat harga naik paling tinggi dalam tahun ini untuk perioda II) terjadi kemunduran jang mengakibatkan tingkat pertumbuhan jang rendah. Dengan bertambah progressifnya tingkat inflasi didalam perioda II tingkat pertambahan produk nasional makin lama makin menurun.

Seperti didjelaskan diatas, perioda III merupakan perioda dimana tingkat inflasi telah mentjapai rekor, jaitu lebih dari 100 persen tiap tahunnya. Angka-angka GNP untuk perioda ini belum tersedia lengkap, tetapi dari hasil perkiraan sementara jang dibuat oleh lembaga<sup>2</sup> ekonomi dan statistik mengenai projeksi tingkat pertambahan GNP dapat diketahui bahwa antara tahun 1961-1968 tingkat kenaikan GNP rata<sup>2</sup> tiap tahunnya adalah 2,2 persen.

Ini semua tidaklah berarti bahwa merosotnya tingkat GNP hanja disebabkan karena inflasi sadja. Djuga faktor<sup>2</sup> lain seperti rendahnja tingkat kapasitas produksi sektor industri, kematjetan<sup>2</sup> dibidang eksport, keadaan prasarana jang djauh daripada memuaskan, mismanagement, dsb. Tetapi dari uraian diatas djelas sudah bahwa inflasi ikut merupakan salah satu faktor jang menghambat kenaikan produksi. Perlu dikemukakan disini bahwa selama perioda<sup>2</sup> tersebut sektor pertanian telah menunjukkan kenaikan produksi setjara kontinu. Kenaikan ini tentunya akan lebih menjolok lagi apabila kedaan inflasi dapat dikurangi, pelaksanaan UUPA dan UUPBH dapat dipertjepat, penjediaan pupuk dapat dilakukan setjara teratur, dsb. Dengan demikian maka memang njatalah bahwa sektor industri adalah sektor jang paling banyak merasakan akibat daripada inflasi.

Sebenarnya dilihat setjara riil, mengusahakan menaikkan produksi dalam negeri (termasuk netto impor) sadja,, seperti jang di andjurkan oleh production approach, tidak mungkin dapat mengimbangi pertam-

bahan djumlah uang jang naik tiap tahunnya sebesar 30 sampai 60 persen, bahkan lebih dari 100 persen, seperti jang terjadi di Indonesia dengan tidak berusaha pula sedikit banjak menekan djumlah uang jang beredar ; artinya harus pula ditempuh suatu moneter approach untuk mengendalikan volume uang jang beredar. Suatu negara jang sudah berindustri modern sakalipun tidak akan mungkin dapat mengikuti ekspansi moneter jang demikian tjeapatnya. Dalam keadaan demikian inflasi pasti akan timbul.

Pendapat golongan structuralist mengenai ketegangan<sup>2</sup> struktural — dan bukan ekspansi moneter — sebagai sumber inflasi tidaklah berarti bahwa suatu usaha stabilisasi harus dengan sendirinya dikesampingkan. Bagi suatu negara jang sedang membangun suatu program stabilisasi harus pula dilaksanakan. Tetapi sebaliknya hal ini tidak boleh pula diartikan bahwa itu sadja sudah tjukup. Suatu moneter approach sadja terhadap persoalan ini tidak dengan sendirinya dapat mendjamin timbulnya usaha-usaha kegiatan jang diperlukan bagi suatu pembangunan ekonomi.

Kelemahan lain jang terdapat didalam analisa golongan structuralist ialah tidak diperhitungkannya bahwa didalam suatu keadaan inflasi jang keras jang dipertahankan setjara terus menerus untuk suatu djangka waktu jang lama dapat memperkuat ketegangan-ketegangan struktural jang ada dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan<sup>2</sup> atau kematjetan<sup>2</sup> jang baru. Suatu proses inflasi jang keras dan lama akan mempengaruhi seluruh sektor ekonomi. Kegiatan<sup>2</sup> produksi akan terhambat, struktur harga akan menjadi katjau, kesulitan<sup>2</sup> akan timbul dibidang ekspor dan bidang produksi agraria, kematjetan<sup>2</sup> akan timbul disektor perhubungan, dsb., sehingga didalam proses selanjutnya ketegangan-ketegangan ini se-akan<sup>2</sup> menjadi sebab daripada inflasi, sedang pada hakekatnya hal<sup>2</sup> tersebut adalah ketegangan<sup>2</sup> jang disebabkan karena inflasi, artinya ketegangan jang „inflation induced”. Baru didalam taraf berikutnya nanti induced bottlenecks ini berubah menjadi

ketegangan jang „inflation feeding”.<sup>9)</sup> Apabila taraf ini tertjapai maka usaha mengendalikan inflasi akan bertambah sulit.

Kita lihat di Indonesia misalnya, bahwa keadaan inflasi jang telah berlangsung untuk djangka waktu jang lama ini telah memaksa Pemerintah untuk mengadakan tindakan<sup>2</sup> pengawasan atau pengendalian harga terhadap barang<sup>2</sup> kebutuhan se-hari<sup>2</sup> dan barang essensiil — sandang pangan, bahan baku, spare-parts, tarif<sup>2</sup> pengangkutan, subsidi-subsi kepada public utilities, dsb. — untuk melindungi tingkat hidup golongan jang berpendapatan tetap dan rendah serta memberi perlindungan kepada industri dalam negeri. Djika dalam keadaan demikian inflasi tetap tidak dapat dikendalikan tetapi malah djustru menandjek keatas, suatu perbedaan antara harga bebas dan harga jang diawasi dapat timbul dan djika mendjadi bertambah besar achirnya dapat mengakibatkan makin berkurangnya, bahkan menghilangnya, barang-barang disektor jang diawasi. Pengawasan dan penekanan harga daripada barang<sup>2</sup> ini, ditambah dengan besarnya keuntungan jang diperoleh djika barang<sup>2</sup> ini didjadikan bahan spekulasi, mengurangi hasrat produksi sektor<sup>2</sup> jang menghasilkannya sehingga bagi masjarakat sebagai keseluruhan hal ini merupakan penurunan supply ; salah satu faktor jang memperkuat inelastisitas penawaran jang oleh golongan structuralist sendiri diakui sebagai salah satu ketegangan struktural.

Bagi negara<sup>2</sup> jang sedang membangun keadaan ini terutama mempunyai komplikasi lain jang lebih luas dalam masalah bahan makanan. Dalam hal ini biasanya dibedakan negara<sup>2</sup> jang surplus eksportnya terdiri dari bahan makanan dan negara<sup>2</sup> jang surplus eksportnya terdiri dari bahan mentah dan hasil mineral.<sup>10)</sup>

<sup>9)</sup> Roberto De Oliveira Campos, „Two Views on Inflation in Latin America”, Hirschman, *op cit.*, hal. 73 - 74.

<sup>10)</sup> Roberto De Oliveira Campos, „Inflation and Balanced Growth”, *Economic Development for Latin America*, H.S. Ellis ed., St. Martin's Press, New York, 1961, hal. 101 - 102.

Djika misalnya terjadi suatu kenaikan pendapatan karena pertambahan investasi, maka bagi negara<sup>2</sup> jang termasuk golongan pertama (jang mempunyai surplus ekspor bahan makanan) hal ini dalam instansi pertama tidak akan banjak mempengaruhi harga bahan<sup>2</sup> makanan atau komponen harga bahan makanan didalam struktur biaja produksi pada umumnya. Effek pertama jang langsung terasa adalah berkurangnya surplus jang dapat disediakan untuk ekspor. Apabila keadaan ini belum memaksa impor diperketjil, maka selama itu pula tekanan<sup>2</sup> inflasi belum terasa. Dengan perkataan lain, effek pertama daripada suatu pertambahan permintaan effektif akan mengenai neratja pembajaran luar negeri dan bukan pada harga bahan makanan dalam negeri.

Keadaan ini sangat berlainan bagi negara-negara jang surplus eksportnya terdiri dari bahan mentah dan hasil pertambangan seperti Indonesia. Suatu kenaikan pendapatan akan langsung memperbesar pertambahan permintaan akan bahan makanan. Karena pada umumnya supply daripada sektor agraria adalah tidak elastis, maka hal ini akan membawa akibat naiknya harga bahan makanan dan dengan demikian ongkos biaja hidup se-hari<sup>2</sup>. Ini akan lebih terasa lagi apabila elastisitas pendapatan daripada permintaan bahan makanan adalah tinggi. Dengan demikian, djika proses inflasi ini berlangsung terus maka achirnya komponen bahan makanan didalam struktur biaja daripada industri<sup>2</sup> akan terpengaruh dan akan mempekeras tingkat kenaikan harga<sup>2</sup>. Untuk menekan keadaan ini biasanya impor bahan<sup>2</sup> makanan harus dilakukan setjara besar<sup>2</sup>an untuk menstabilkan harga, meskipun tindakan ini tidak akan selalu berhasil. Pada achir tahun 1955 misalnya, tingkat harga di Indonesia telah naik dengan tjeput sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk menekan kenaikan harga ini, terutama harga bahan makanan, J.U.B.M. pada waktu itu telah melempar persediaan beras dari stocknya sebesar 400 ribu ton, dan kemudian menaikkan impor beras dari 125 ribu ton pada tahun 1955 menjadi 800 ribu ton pada tahun berikutnya. Tetapi ter-

njata bahwa hal ini telah tidak dapat membawa stabilisasi harga seperti jang diharapkan karena permintaan effektif telah naik dengan tingkat ketjepatan jang lebih besar.

Disektor perdagangan luar negeri pengalaman inflasi jang lama ini di Indonesia djuga telah menjebabkan kemerosotan dan ketegangan<sup>2</sup> jang tidak ketjil pada volume dan perkembangan ekspor. Memang harus diakui bahwa kemerosotan kegiatan disektor ini djuga tidak hanja disebabkan karena inflasi sadja, tetapi djuga karena kesulitan<sup>2</sup> lain, terutama kesulitan fisik jang menghambat produksi seperti tidak lantjarnja pengangkutan dan perhubungan didarat maupun dilaut, kurang sempurnanya organisasi dan management, gangguan keamanan, dan tentunya djuga perkembangan harga dipasar internasional.

Sebaliknya Pemerintah, didalam Nota Pendjelasannya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1963/1964, menjatakan bahwa „keadaan inflasi telah menimbulkan akibat<sup>2</sup> buruk setjara simultan disegala bidang, chususnya sangat memberatkan perkembangan ekspor. Naiknya harga-harga didalam negeri telah menjebabkan ikut naiknya biaja-biaja produksi ; spekulasi jang ditimbulkap oleh inflasi mendjalar pula pada bahan-bahan ekspor, dan makin menambah besar gedjala disparitet jang tambah mempersulit ekspor.<sup>11)</sup> „Djelaslah kiranya”, demikian Pemerintah, „bahwa suatu bagian besar dari kesulitan dilapangan perdagangan internasional pada hakekatnya bersumber pada inflasi. Hanjalah apabila inflasi dapat diatasi, boleh diharapkan adanya dasar-dasar untuk memperbaiki perdagangan internasional setjara permanen.”<sup>12)</sup>

Untuk menahan mundurnya ekspor ini berbagai tindakan telah diambil oleh Pemerintah. Penjesuaian kurs-kurs baru buat ekspor dilakukan untuk menghilangkan perbedaan antara nilai tukar rupiah dengan nilai valuta asing ; subsidi-subsidi diberikan kepada ekspor setjara

<sup>11)</sup> Nota Pendjelasan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun 1963 dan 1964, hal. 13.

<sup>12)</sup> Nota Pendjelasan, op cit., hal. 14.

langsung maupun melalui suatu multiple-exchange-rate, penggunaan daripada sistem retensi dan alokasi devisa jang diperoleh eksportir maupun keringanan<sup>2</sup> didalam pemungutan padjak ekspor. Semua ini menunjukkan bahwa inflasi telah menimbulkan ketegangan<sup>2</sup> jang mengchawatirkan keadaan ekspor. Apabila keadaan inflasi tidak dapat dikendalikan, maka tindakan<sup>2</sup> tersebut hanjalah merupakan keringanan sementara sadja jang harus disusul dengan tindakan-tindakan lain apabila kematjetan ekspor hendak diperketjil atau dihindarkan.

Gedjala disparitas jang disinggung oleh Pemerintah memang sudah tidak asing lagi dibidang ekspor. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara harga pasar bebas dan harga resmi jang effektif sehingga mengalihkan tudjuan hasil ekspor atau faktor-faktor produksi dilapangan ekspor dari pasar internasional kepasar dalam negeri. Pengaruhnya akan terutama terasa pada hasil ekspor jang permintaan dalam negerinya mempunyai elastisitas jang besar terhadap kenaikan pendapatan dan jang sifat penawarannya adalah kurang elastis, sehingga pertambahan permintaan dalam negeri hanja dapat ditampung dengan mengurangi djumlah jang disediakan untuk ekspor dan bukan dengan pertambahan produksi. Dengan perkataan lain, pertambahan permintaan effektif jang disebabkan karena ekspansi moneter akan menarik beberapa matjam barang ekspor untuk keperluan konsumsi dalam negeri dan bukan untuk ekspor. Barang-barang ini biasanya termasuk hasil ekspor jang „lemah”, seperti misalnya teh, kopi, tembakau, gula dan sebagainya. Bagi bahan-bahan ekspor jang „kuat” seperti karet, timah, kopra, dsb., pengaruhnya terhadap perobahan permintaan dalam negeri adalah tidak begitu besar karena konsumsi dalam negeri untuk barang-barang tersebut memang relatif ketjil, sedang elastisitas pendapatan untuk barang-barang tersebut adalah rendah, dan juga karena memang barang<sup>2</sup> tersebut diproduksi hanja untuk di-ekspor. Tetapi apabila inflasi terus meningkat, maka pengalaman di Indonesia membuktikan bahwa untuk bahan-bahan inipun dialami keadaan jang sama seperti hasil ekspor jang „lemah”.

Tabel II

**Indeks Volume Ekspor Indonesia, 1953 - 1962**  
(1953 = 100)

Tahun	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
Bahan ekspor „kuat”	100	103,8	95,8	93,9	95,1	7,14	84,5	73,5
Bahan ekspor „lemah”	100	216,7	212,7	146,2	141,7	95,7	137,6	106
Ekspor seluruhnya	100	160,3	154,3	120	118,4	83,5	111	89,8
Tahun	<b>1961 1962</b>							
Bahan ekspor „kuat”		91,9	78,1					
Bahan ekspor „lemah”		93,3	70,2					
Ekspor seluruhnya		92,6	74,2					

Angka-angka dihitung dari „Statistical Pocketbook of Indonesia”, Biro Pusat Statistik, tahun 1953 sampai dengan 1962.

Djika diperhatikan Tabel II diatas, maka dapat dikatakan bahwa semendjak tahun 1954 volume ekspor, baik ekspor bahan „kuat” maupun hasil ekspor „lemah”, menunjukkan tendensi menurun. Bagi bahan ekspor lemah, kenaikan jang menjolok antara tahun 1953 dan tahun<sup>2</sup> berikutnya adalah disebabkan karena melondjakanja ekspor gula semendjak tahun 1954. Untuk tahun 1954 ekspor gula telah naik dengan lebih dari 100 persen, tetapi makin lama makin menurun sehingga achirnya pada tahun 1962 hanja mentjapai sepertujuh volume ekspor tahun 1954.

Merosotnya volume ekspor pada tahun 1955, bersamaan dengan naiknya tingkat harga sebesar 40 persen pada tahun itu (tahun<sup>2</sup> sebelumnya rata<sup>2</sup> kurang dari 10 persen), dan menurunnya ekspor pada tahun<sup>2</sup> berikutnya bersamaan dengan naiknya tingkat inflasi yang makin lama makin progressif, bukanlah suatu hal yang kebetulan sadja. Dengan demikian nyata bahwa barang<sup>2</sup> ekspor tersebut telah menjadi bahan spekulasi dalam negeri dan tidak disalurkan untuk ekspor keluar negeri.

Dengan merosotnya volume ekspor akan berkurang pula jumlah devisa yang diterima sehingga akan mengakibatkan menurunnya pula potensi impor. Hal ini akan memperkuat gedjala import bottleneck seperti yang dikemukakan oleh golongan structuralist. Tetapi import bottleneck ini juga dapat menimbulkan kematjetan<sup>2</sup> disektor lain. artinya dengan berkurangnya potensi impor akan berkurang pula impor bahan baku, bahan penolong, spare parts, barang modal dan barang<sup>2</sup> impor lainnya, sehingga kegiatan<sup>2</sup> ekonomi didalam masjarakat, terutama sektor-sektor industri yang tergantung sekali pada bahan<sup>2</sup> impor, akan mengalami kemunduran<sup>2</sup>. Pengalaman beberapa tahun yang akhir ini menunjukkan adanya gedjala tersebut. Antara tahun 1960 dan 1962 misalnya, hasil ekspor Indonesia telah turun dengan 22 persen yang menjebabkan kerugian pada perdagangan devisa sebesar kira-kira Rp. 10,— miljar (pada akhir tahun 1960 tertjatuh Rp. 14,1 miljar dan akhir tahun 1962 tinggal Rp. 4,3 miljar.<sup>13</sup>) „Keadaan kekajaan emas dan devisen seperti yang dilukiskan diatas tidak memungkinkan Pemerintah untuk mendjamin konsumsi maupun produksi pada tingkat yang lajak. .... Pentjutan impor yang terpaksa dilakukan untuk mendjaga solvabilitas internasional dari Negara kita, dapat dibayangkan membawa kesulitan<sup>2</sup> lebih lanjut dibidang ekonomi : (a) tidak terdjaminnja persediaan bahan<sup>2</sup> baku, penolong, serta spare-parts untuk kesatuan<sup>2</sup> produksi dan pengangkutan, menjebabkan produksi menurun .....”<sup>14</sup>) Impor dari bahan baku dan bahan lainnya terpaksa dikurangi dengan

<sup>13)</sup> Nota Pendjelasan, op. cit., hal. 14.

<sup>14)</sup> Ibid.

drastis sehingga mengakibatkan produksi pada sektor industri turun dengan kira-kira 20 persen pada tahun 1962 dan timbulnya idle capacity pada hampir setiap matjam industri. Untuk tahun 1963 dan 1964 taksiran sementara menunjukkan bahwa pada umumnya sektor industri hanja bekerja atas dasar 30 persen kapasitas.

Untuk periode 1951-1959, apabila turunnya produksi sektor industri ini dinjatakan dalam nilai produksi yang ditjapai, maka dalam tahun 1951-1952 sektor industri menghasilkan Rp.9 miljar, kemudian naik menjadi Rp.16,1, dalam tahun 1957, merosot sampai Rp.9,8 miljar dalam tahun 1958, dan Rp. 10,4 miljar dalam tahun berikutnya. Sumber terbesar daripada kemerosotan produksi industri untuk periode ini pun ternyata adalah stagnasi dalam ekspor sehingga bahan-bahan impor yang diperlukan industri tidak dapat disediakan dalam jumlah yang tjukup.

Bagi Indonesia, dan juga pada umumnya bagi negara<sup>2</sup> lain yang sedang dalam taraf pembangunan, berkurangnya ekspor dan merosotnya produksi dalam negeri akan membawa akibat berkurangnya pendapatan negara dalam bentuk padjak dan penerimaan-penerimaan lain. Apabila taksiran tidak resmi dari kalangan pedjabat padjak mengenai penerimaan negara dapat dipergunakan, maka tahun 1953 memperlihatkan penerimaan negara sebesar 10,4 persen dari GNP, tetapi sepuluh tahun kemudian (1963) merosot menjadi 5,7 persen dari GNP. Ini berarti bahwa apabila Pemerintah ingin mempertahankan pengeluaran<sup>2</sup>nya yang riil, hal ini hanja dapat dilakukan dengan djalan menambah defisit pada Anggaran Belanja Negara.

Dengan demikian djelaslah bahwa pengalaman-pengalaman mengenai inflasi di Indonesia membuktikan bahwa suatu usaha stabilisasi moneter tetap diperlukan. Ini tidak berarti bahwa harus ditjapai suatu stabilisasi yang mutlak ; yang perlu adalah mengusahakan agar inflasi dapat ditekan sampai tingkat yang dapat dikendalikan. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya penghambatan yang timbul dalam proses inflasi yang tadjam, yang hanja akan memperkuat atau memperbaik ketegangan-ketegangan struktural yang sudah ada sadja.

Sebaliknya harus diingat pula bahwa suatu monetar approach sadja terhadap persoalan ini tidak dengan sendirinya mendjamin kegiatan<sup>2</sup> untuk pembangunan. Masing<sup>2</sup> approach, baik pendapat golongan monetarist maupun golongan structuralist dan monetar approach serta production approach jang terdapat di Indonesia sendiri, tidak dapat berdiri sendiri-sendiri ; suatu approach jang integral harus dipergunakan. Oleh karenanya adalah tidak tanpa alasan jang kuat jika didalam DEKON dikatakan bahwa : „Keadaan jang mendesak ini tidak dapat diatasi sebagai masalah jang berdiri sendiri, lebih-lebih tidak mungkin kita atasinya hanja dengan tindakan monetar konvensionil belaka. Sebaliknya, tidak ada djalan mudah jang dapat mengangkat kita dari impasse sekarang ini, ketjuali atas dasar menggerakkan segenap potensi dan kekuatan rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita.”<sup>15)</sup>

<sup>15)</sup> Deklarasi Ekonomi, Departemen Penerangan R.I., hal. 11 - 12.

#### KEPUSTAKAAN

1. Campos, Roberto De Oliveira, „Inflation and Balanced Growth”, *Economic Development for Latin America*. H.S. Ellis (ed.), St. Martin’s Press, New York, 1961.
2. Campos, Roberto De Oliveira, „Two Views on Inflation in Latin America”, Hirschman (ed.), *Latin American Issues*. New York, Twentieth Century Fund, 1961.
3. Felix, D., „An Alternative View of the „Monetarist” — „Structuralist” Controversy”, Hirschman (ed.), *Latin American Issues*. New York, Twentieth Century Fund, 1961.
4. Grunweld, Joseph, „Structuralist School on Price Stability and Development: The Chilean Case”, Hirschman (ed.), *Latin American Issues*. New York, Twentieth Century Fund, 1961.
5. Martin, Kurt, „Laporan Seminar Inflasi dan Pembangunan Ekonomi”, *Warta Leknas*, Th. I/No. 4/1963.
6. Prebisch, Raul, „Economic Development or Monetary Stability: The False Dilemma”, *Economic Bulletin for Latin America* (March 1961).
7. Seers, Dudley, „A Theory of Inflation and Growth in Underdeveloped Economies based on the Experience of Latin America” *Oxford Economic Papers*, June 1962.
8. Deklarasi Ekonomi, Departemen Penerangan R.I., Djakarta.
9. Nota Pendjelasan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun 1963 dan 1964.
10. Rantjangan Dasar Undang<sup>3</sup> Pembangunan Nasional-Semesta Berentjana Delapan Tahun, 1961 - 1969.

